

**PENCITRAAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI MEDIA  
PADA BAGIAN HUMAS DI SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**Muhammad Abid<sup>1</sup>, Ahmad Syauqi<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Dosen Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Al Asyariah Mandar  
Email: abid0401@gmail.com

<sup>2</sup>Dosen Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Al Asyariah Mandar  
Email: ahmadsauqi87878@gmail.com

**ABSTRACT**

*This study aims to know how the imaging of the government is done through the media by the state of the public in the Polman Regional Secretariat. This research is a qualitative research that explains the phenomenon in depth, creates a description, systemally, accurately and facts about the facts, as well as describing the reality that is happening. The role of public relations as a communicator's that is helping the community to interaction and communication to the government. The role of public relations as relationships are relatively good relationships between the whole community with government agencies, through delivery of regional development information. The role of public relations in building the image of the Government of Polewali Mandar Regency to the public can be seen from information updates through the internet site.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pencitraan yang dilakukan Pemerintah melalui media oleh bagian Humas di Sekretariat Daerah Polman. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menjelaskan fenomena secara mendalam, membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta, serta menggambarkan realitas yang terjadi. Peran Humas sebagai komunikator yaitu membantu masyarakat membangun interaksi dan komunikasi kepada pemerintah dan sebaliknya, melalui kegiatan sosialisasi. Peran Humas yaitu menciptakan hubungan yang baik antar seluruh masyarakat dengan instansi Pemerintah, melalui penyampaian informasi pembangunan daerah. Peran Humas dalam membangun citra Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar kepada masyarakat dapat dilihat dari informasi *update* melalui situs internet.

**Kata Kunci:** *Humas, publik, interaksi, media.*

## PENDAHULUAN

Otonomi daerah adalah hasil dari era reformasi dan demokratisasi yang memberikan kewenangan dan peluang yang sangat luas bagi daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi di sisi lain otonomi daerah juga merupakan tantangan yang menuntut tiap-tiap daerah untuk selalu mengembangkan inovasi, strategi dan ide-ide baru untuk menghadapi tantangan persaingan regional dan global yang semakin meningkat.

Keberadaan Humas pada instansi pemerintahan sangat penting, baik secara fungsional dan operasional dalam upaya mempublikasikan atau menyebarkan suatu kegiatan instansi. Dalam keberadaannya terdapat beberapa tugas, dan fungsi atau peran, salah satunya adalah membangun dan mempertahankan hubungan baik dengan pihak internal maupun eksternal. Menjalin hubungan internal yakni dengan segenap pegawai yang ada di lingkungan lembaga, sedangkan untuk pihak eksternal yaitu dengan surat kabar, dimana media ini sangat penting bagi kegiatan kehumasan karena memiliki kekuatan di hadapan publik. Seiring dengan hal tersebut, saat ini mulai tumbuh dengan apa yang disebut *electronic government (egov)* sebagai implementasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan. Perkembangan ICT (*Information and Communication Technology*) yang semakin pesat harus disikapi sebagai peluang sekaligus tantangan yang perlu diantisipasi dengan jalan menyiapkan perangkat dan sistem jaringan teknologi informasi yang dapat dengan mudah diakses dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat.

Aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal serta semakin besarnya tuntutan demokratisasi dan semakin transparannya akses informasi perlu disikapi dengan cepat dan tepat. Hal ini bertujuan agar pemerintah daerah tetap mendapatkan kredibilitas, sehingga masyarakat mudah diajak berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan nasional. Pemerintah daerah dituntut dapat memberikan pelayanan publik dengan memenuhi kriteria *better, cheaper, dan faster*. Selain itu, dalam rangka ikut berpartisipasi baik dalam bentuk dukungan, sanggahan, maupun kritikan, diperlukan media yang mudah diakses agar masyarakat sewaktu-waktu dapat mengetahui apa saja kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah.

Penggunaan ICT di lingkungan pemerintahan memunculkan istilah *e-government* yang dalam beberapa kasus berhasil memberikan banyak nilai positif yang menggembirakan. Pelayanan publik menjadi lebih cepat, tepat, mudah dan murah seperti yang selama ini diharapkan masyarakat. Aktivitas

pemerintahan pun menjadi efektif dan efisien. Tetapi sebaliknya, penerapan *e-government* yang kurang berhasil justru menimbulkan beberapa masalah. Hal ini disebabkan karena belum dipahaminya secara komprehensif peranan ICT dalam komunitas tertentu serta kurangnya persiapan aparatur pemerintah dan rendahnya pengetahuan masyarakat.

Beberapa kendala terhadap penerapan *e-government* di berbagai daerah di antaranya, peraturan seputar *e-government* yang cenderung masih lemah. Misalnya Inpres No. 3/2003 tentang kebijakan dan strategi pengembangan *e-government*. Dari Inpres tertanggal 9 Juni 2003 itu, hanya ada satu petunjuk pelaksanaan yang diturunkan, yakni standarisasi penerapan *e-government*. Sementara *Cyber Law* (UU Informasi dan Transaksi Elektronik) juga belum ada. Ini mengakibatkan tahapan ketiga *e-government*, yaitu transaksi menjadi terhambat. Depkominfo sebagai lembaga yang menangani *e-government* di Indonesia juga tidak mempunyai “kaki” di daerah sehingga menyulitkan upaya koordinasi untuk pengembangan *e-government*. Kasus lain yaitu belum adanya pemahaman yang tepat mengenai esensi *e-government* disebabkan lemahnya sumber daya manusia (SDM).

Peran dari Humas Pemerintah Daerah merupakan bagian penting untuk meningkatkan media internal yang ada di sebuah institusi, dalam tugasnya menyampaikan informasi yang berperan penting untuk mensukseskan pembangunan di suatu daerah. Media informasi yang baik dan efisien, bisa menciptakan kesatuan langkah antar karyawan dan pemimpinnya untuk mencapai tujuan bersama. Jika sistem informasi dari media internal tidak berjalan baik maka dimungkinkan terjadinya tumpang tindih kegiatan, bahkan bisa terjadi kegiatan yang saling bertentangan. Sistem informasi yang baik memungkinkan program-program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah bisa direspon oleh seluruh atau sebagian besar masyarakat sehingga bisa meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan di daerah.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena secara mendalam, membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta atau sifat-sifat objek, serta menggambarkan realitas yang sedang terjadi tanpa menjelaskan hubungan antar variabel (Kriyantono, 2006: 67).

### **Instrumen Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini yang menjadi instrument penelitian adalah; obseravasi, wawancara, dan dokumentasi.

## Teknik Pengumpulan Data

Untuk mencari informasi guna mendapatkan data-data yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik yaitu:

- a. Observasi; Observasi dilakukan di Sekretariat Daerah dengan cara pengamatan langsung kelapangan untuk mengamati keadaan di bagian Humas Sekretariat Daerah tersebut yang mengenai tentang peran Humas dalam pencitraan Pemerintah Daerah melalui situs Internet.
- b. Wawancara mendalam (*in depth interview*); cara mengumpulkan data-data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data secara lengkap dan mendalam (Kriyantono, 2006: 100). Wawancara menggunakan dua jenis. *Pertama*, wawancara terstruktur yaitu menggunakan daftar pertanyaan yang telah dibuat oleh penulis sebagai panduan (*interview guide*). Dan *kedua*, wawancara tidak terstruktur, menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang muncul secara spontan dan merupakan perkembangan dari daftar pertanyaan yang ada, sifatnya informal.
- c. Dokumentasi; peneliti mencari dokumen yang berkaitan baik berupa dokumen publik atau dokumen privat. Dokumen publik misalnya laporan polisi, berita-berita surat kabar, traskrip acara TV, dan lainnya. Dokumen privat misalnya memo, surat-surat pribadi, catatan telepon, buku harian individu, dan lainnya (Kriyantono, 2006: 118).

## Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif. Artinya data yang diperoleh dari penelitian disajikan apa adanya kemudian dianalisis untuk memperoleh gambaran mengenai fakta yang ada di lapangan. Analisis dilakukan pada seluruh data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumen-dokumen. Adapun tahap-tahap analisis tersebut dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu:

- a. Reduksi data, yakni proses penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi dari data kasar yang muncul pada catatan tertulis di lapangan.
- b. Penyajian data, dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian ini dapat dilakukan dengan menyusun matriks, grafik, atau bagian menggabungkan informasi sehingga mencapai analisis kualitatif yang valid.
- c. Penarikan kesimpulan, yakni setelah data disajikan, peneliti memberikan makna, tafsiran, *argument* membandingkan data dan mencari hubungan antara satu komponen dengan komponen lain.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pencitraan Humas melalui Situs Internet

Peran Humas Sekda Polman lebih dari sekedar menyebarkan informasi mengenai pembangunan. Humas adalah sebagai alat manajemen yang kuat yang dapat membangun reputasi pemerintah daerah; membentuk dan mempengaruhi opini publik; dan yang paling penting, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, dapat diuraikan mengenai peran Bagian Humas Sekretariat Daerah Polewali sebagai berikut:

#### 1. Penasihat Ahli (*Expert Prescriber*)

Humas adalah sebuah unit yang mempunyai tugas untuk membangun kerja sama, saling pengertian, saling menghargai dengan komunikasi dua arah. Humas merupakan fungsi manajemen yang membentuk dan mengelola hubungan saling menguntungkan antara organisasi dan masyarakat (publik). Keberhasilan atau kegagalan hubungan ini tergantung pada fungsinya sehingga wajar jika pemerintah daerah Polewali meletakkan Humas sebagai penasehat ahli.

Dalam menjalankan peranannya sebagai penasehat ahli di kehumasan Muh. Azwar Yasin, Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali menyatakan bahwa:

“Humas Kabupaten Polewali Mandar berperan sebagai penasihat ahli. Tugas saya di sini adalah memfasilitasi dan menjembatani komunikasi dua arah atau timbal-balik yang intensif antara pemerintah kabupaten dan masyarakat, guna mendukung terciptanya tujuan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar serta terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui penyebaran berita lewat media, baik media cetak maupun media elektronik.”

Lebih lanjut menurut Muh. Azwar Yasin menyatakan bahwa:

“Aspek SDM sangat penting dan paling menentukan terhadap keberhasilan dan kualitas kerja Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Sangat penting untuk memperhatikan aspek-aspek seperti; etos kerja, kedisiplinan dan loyalitas; kemampuan teknis dan profesionalisme; mekanisme *reward* and *punishment* yang proporsional; dan aspek kesejahteraan dan pengembangan karier.”

## 2. Fasilitator Komunikasi (*Communication Facilitator*)

Dalam wawancara terhadap penasihat ahli yang juga merupakan pelaksana tugas Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali dapat diuraikan bahwa humas berperan sebagai fasilitator komunikasi antara pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dengan masyarakatnya.

Yang dilakukan oleh kepala bagian Humas dan staf, masing-masing seperti:

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang tugas pokok, fungsi aktivitas dan kebijaksanaan pemerintah daerah atau kebijakan di masing-masing satuan kerja atau satuan kerja perangkat daerah.
- b. Menangkap aspirasi masyarakat dan menyampaikan kepada pemerintah atau satuan kerja di jajaran masyarakat.
- c. Mewujudkan integrasi, kreasi dan keselarasan antara kepentingan pemerintah/instansi dan kepentingan masyarakat.
- d. Mendorong dan menegakkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan dan meningkatkan pembinaan secara baik, citra dan martabat pemerintah daerah dan instansi dalam hal ini satuan kerja di jajaran pemerintah daerah.

Selain itu, Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar menyatakan:

“Aktivitas yang saya lakukan selaku kepala bagian humas yaitu memimpin kehumasan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam melaksanakan tugas kehumasan dan layanan informasi sehari-hari. Mengkoordinir staf dalam melaksanakan tugasnya, menyusun laporan triwulan, menjadi penghubung guna mendukung kegiatan antar lembaga, menyusun dan merencanakan agenda kehumasan, menerima dan memproses keberatan atau penolakan pemberian informasi. Selain itu, juru bicara pemerintah Kabupaten Polewali, sub bagian humas bertanggung jawab terhadap penyampaian serta kelancaran informasi yang diperlukan masyarakat serta menyebarluaskan informasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kepada masyarakat. Selain itu, memberikan pertimbangan kepada pimpinan terkait informasi dan isu yang berkembang di masyarakat dalam rangka mendukung program dan kegiatan dalam upaya menunjang kelancaran tugas dan fungsinya”. (wawancara, )

Seluruh tugas tersebut diharapkan dapat menumbuhkan citra dan kesan baik masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Dalam pelaksanaannya, bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar juga berkewajiban membangun dan menciptakan hubungan yang baik dan harmonis dengan segenap unsur, baik kelembagaan pemerintah maupun swasta, serta

mengembangkan kemitraan dengan organisasi dan tokoh-tokoh masyarakat, khususnya dengan insan *pers* dan media massa.

Lebih lanjut, menurut Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar:

“Makna penting dari pembangunan daerah adalah adanya kemajuan, perbaikan pertumbuhan dan diversifikasi. Jadi informasi pembangunan yang disampaikan kepada masyarakat Polewali yaitu berupa data mengenai perubahan, kemajuan teknologi, perluasan wawasan dan pola pikir masyarakat, perilaku dan gaya hidup masyarakat. Proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial budaya, politik, yang berlangsung pada level makro dan mikro.”  
(*Wawancara*, 12 Juli 2016)

Jadi, informasi pembangunan yang disampaikan Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar kepada masyarakat yaitu, informasi kebijakan, program dan kegiatan internal dan eksternal, baik dalam bentuk cetakan, foto, maupun data elektronik.

### 3. Fasilitator Proses Pemecahan Masalah (*Problem Solving Process Facilitator*)

Humas yang mengambil peran sebagai fasilitator komunikasi pemecahan masalah, bekerja sama dengan bagian atau divisi yang lain dalam mendefinisikan dan menyelesaikan masalah. Berlanjut hingga evaluasi program akhir. Peran Humas sebagai fasilitator proses pemecahan masalah, yaitu bagaimana Humas mampu mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar, baik secara proaktif, antisipatif, inovatif, dinamis, dan solutif terhadap masyarakat.

Masalah biasanya terjadi karena perbedaan persepsi dan keinginan yang terjadi dimasyarakat. Belum lagi penyebarluasan informasi belum mampu mencapai ke tempat-tempat tertentu di seluruh wilayah Polewali. Maka dalam hal ini, Humas berperan untuk menurunkan sejauh mungkin perbedaan antara persepsi dan keinginan masyarakat dengan tujuan dari pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar melalui tahapan-tahapan sosialisasi, baik yang bersifat antisipatif maupun bersifat perbaikan.

### 4. Teknisi Komunikasi (*Communication Technician*)

Menurut pelaksana tugas Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali, yang berperan sebagai teknisi komunikasi adalah sub bagian informasi publik.

“Sub bagian informasi publik mempunyai tugas melaksanakan pelayanan informasi dan dokumentasi; mengumpulkan, mengelola, mendokumentasi dan mempublikasikan informasi kebijakan, program dan kegiatan baik dalam bentuk cetakan, foto, maupun data elektronik.” (*Wawancara*, 12 Juli 2016)

Menurut Kasubag Pengumpulan Informasi Humas, Yaya Hidayah Arif peran penyediaan pelayanan teknis komunikasi dalam penyebaran informasi pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai berikut:

“Sub bagian informasi publik dalam melayani publik membentuk pusat layanan informasi publik untuk melayani permohonan informasi publik di lingkungan pemerintah kabupaten, membuat siaran pers, melaksanakan konferensi pers atau jumpa pers, menulis, menyunting dan memodifikasi informasi publik, menyusun dan mendistribusikan sajian berita dalam bentuk foto, video dan berbagai artikel untuk kebutuhan publik membuat konsep dan menyusun materi informasi publik yang akan dipublikasikan melalui teknologi informasi milik bagian hubungan masyarakat.” (*Wawancara*, 12 Juli 2016)

Untuk teknis komunikasi dalam hal penyebarluasan informasi mengenai kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar, yang dilakukan di antaranya; menyusun data dan informasi strategis tentang kebijakan, program dan kegiatan, menyiapkan dan menganalisis data latar belakang kebijakan pemerintah sebagai bahan informasi publik, dan kemudian menyusun materi ringkasan untuk pemberitaan kebijaksanaan pemerintah melalui media massa.

Dalam wawancara, Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar menyatakan bahwa peran Humas pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam penyebaran informasi pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

“Tidak serta merta informasi kita berikan, harus melalui analisa lebih dulu permintaan tersebut yang ditelaah Humas. Disini kita melakukan mediasi bekerja sama dengan media misalnya dengan KOMINFO dalam rangka meliput tentang keadaan wilayah Polewali dan keadaan di sekitarnya. Kita juga menyediakan *contact person* apabila wartawan membutuhkan informasi sesuai prosedur yang berlaku dan yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah Sub Bagian Hubungan Publik.” (*Wawancara*, 12 Juli 2016)

Dari penjelasan wawancara ini, dapat diuraikan bahwa bagian Humas sekretariat daerah Kabupaten Polewali Mandar juga berkewajiban membangun dan menciptakan hubungan yang baik dan harmonis dengan segenap unsur baik kelembagaan pemerintah maupun swasta, serta mengembangkan kemitraan dengan organisasi dan tokoh-tokoh masyarakat, khususnya dengan insan *pers* dan media massa. Peran bagian Humas



diperlukan terutama dalam mengatur informasi baik ke dalam maupun ke luar, memonitor dan merekam opini publik serta tanggapan masyarakat terhadap pemerintah. Jika penyebaran informasi dalam hubungan internal tidak berjalan baik maka dimungkinkan terjadinya tumpang tindih kegiatan, bahkan dapat terjadi kegiatan yang saling bertentangan.

Sistem penyebarluasan informasi yang baik memungkinkan program-program dan kegiatan yang dilakukan Pemerintah dapat direspon oleh seluruh atau sebagian besar karyawan sehingga dapat meningkatkan partisipasi karyawan pemerintah daerah. Sedangkan jika hubungan tidak berjalan baik, dikhawatirkan akan memperlambat arus komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat dalam mengaktualisasikan informasi pembangunan.

Bagian dari divisi kehumasan adalah sub bagian informasi publik. Bagian ini memiliki peran sebagai juru bicara, mempublikasikan tentang keunggulan daerah meliputi pembangunan pemerintah serta mendokumentasikan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan di Kabupaten Polewali Mandar.

Tak hanya itu, humas juga berperan sebagai mitra pencitraan *good government* dengan media massa sehingga jalinan kerjasama antara pemerintah yang diwakili oleh Humas dengan media massa berjalan dengan baik dalam rangka memberikan informasi kepada khalayak ramai. Selain mempublikasikan tentang pembangunan pemerintah, Humas juga menampung informasi yang menjadi keluhan masyarakat, baik yang menyoroti tentang pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, tidak hanya menjadi bagian dari pemerintah daerah, tetapi juga membaur kepada masyarakat sehingga mewujudkan keharmonisan antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam wawancara dengan Kasubag pengumpulan informasi bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar menyatakan:

“Salah satu kegiatan publisitas humas yaitu tiap tahunnya ada program sosialisasi anti narkoba. Sekaligus sebagai tempat mensosialisasikan peran dan fungsi dalam membantu mewujudkan *good governance* di Indonesia secara khusus di Polewali Mandar serta membagi stiker kepada masyarakat. Ini sudah efektif bersentuhan langsung kepada masyarakat dan akan terukur pada saat tanya jawab sejauh mana mereka ikut serta.”  
(Wawancara, 12 Juli 2016)

Untuk membuat publisitas yang baik terhadap penyebarluasan informasi pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar, maka salah satu cara untuk meningkatkan kinerja humas dalam mempublikasikan informasi terkait pemerintah daerah, yaitu melalui *Training* Pengelolaan Keterbukaan Informasi

Publik yang diikuti oleh PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dari setiap satuan kerja perangkat Daerah Polewali dalam konteks keterbukaan informasi publik yang bertujuan untuk membangun sebuah sistem tata kelola informasi publik yang baik.

*Training* ini juga untuk menyatukan visi dan misi PPID, serta menyamakan pemahaman dan pengetahuan di antara seluruh peserta *training*. Selain itu, *training* yang dilakukan diharapkan dapat membantu PPID dalam tugas pelayanan keterbukaan informasi publik secara lebih baik, sekaligus memberikan jaminan kenyamanan serta optimalisasi kinerja seluruh SKPD Kabupaten Polewali .

#### 5. Pendekatan yang Digunakan dalam Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Sebagai publisitor dalam penyebarluasan informasi pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar, maka Humas sekretariat daerah Kabupaten Polewali Mandar melakukan berbagai strategi sebagai upaya menciptakan iklim yang kondusif yaitu melalui pendekatan edukatif dan persuasif serta pendekatan kerjasama dengan pembahasan sebagai berikut:

##### a) Pendekatan Edukatif dan Persuasif

Pendekatan edukatif dan persuasif merupakan upaya Humas Pemda Kabupaten Polewali Mandar dalam penyebarluasan informasi pembangunan daerah kepada masyarakat. Dengan menciptakan komunikasi dua arah secara timbal balik yang bersifat mendidik dan memberikan penerangan maupun dengan pendekatan persuasif (mengajak/membujuk khalayak) agar tercipta saling pengertian.

Dalam wawancara yang dilakukan terhadap Sub Bagian Informasi Publik yaitu Kasubag Pemberitaan Humas, Yudi Ardiansyah menyatakan:

“Humas Pemerintah Daerah melakukan pendekatan edukatif dan persuasif ke masyarakat yaitu melalui media komunikasi Humas. Media komunikasi Humas Pemda Polewali terdiri dari surat kabar yang khusus menginformasikan hal-hal yang terjadi di wilayah Polewali dan sekitarnya di antaranya Harian Radar Sulbar dan Polewali Terkini. Berita seputar Polewali; radio, TV, bahan-bahan cetakan seperti Buletin Organisasi dan Baliho, dan media internet.” (*Wawancara*, 13 Juli 2016)

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diuraikan tentang media komunikasi Humas Pemerintah Daerah Polewali yakni: (a) surat kabar cetak dan online serta media elektronik, (b) bahan-bahan cetakan dalam berbagai bentuk, (c) media internet dalam berbagai aplikasi. Dengan adanya media informasi yang digunakan tersebut diharapkan dapat memperlancar arus

komunikasi dua arah yang saling memberikan *feedback* antara pemerintah dan masyarakat.

b) Pendekatan Kerjasama

Selain pendekatan persuasif dan edukatif, Humas sekretariat daerah Kabupaten Polewali juga melakukan pendekatan kerjasama. Pendekatan kerjasama merupakan upaya Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar dalam membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan berbagai pihak luar maupun dalam, untuk meningkatkan partisipasi dan dukungan guna menunjang pembangunan Pemerintah. Dalam pendekatan kerjasama, Humas sekretariat daerah Kabupaten Polewali Mandar bekerja sama dengan PPID dari tiap satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

Pendekatan kerjasama ini mutlak diperlukan untuk menyebarluaskan informasi pembangunan terutama untuk menjangkau masyarakat awam yang belum atau tidak mengerti teknologi. Seperti halnya Ibu Suaidah, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di salah satu desa di Kabupaten Polewali Mandar. Ibu Suaidah menyatakan bahwa:

“Saya hanya masyarakat awam yang profesinya hanya sekedar ibu rumah tangga. Kadang untuk mendapatkan informasi terbaru saya sering terlambat karena saya tidak terlalu bisa menggunakan teknologi. Boroboro menggunakan teknologi, menggunakan hape saja hanya untuk SMS dan menelpon. Jadi kalo menurut saya penyebaran informasi itu lebih cepat dan lebih baik jika disampaikan kepada orang yang berwenang di masyarakat seperti pemuka adat, tokoh-tokoh masyarakat, Camat, Lurah, Kepala Desa, ataupun RT. Orang seperti saya dapat memperoleh informasi dengan cepat. Penyebaran informasi juga harus dilakukan dengan melibatkan masyarakat untuk kepentingan masyarakat, jadi masyarakat mengetahui informasi tentang yang terjadi di daerahnya beserta pembangunan apa saja yang terjadi di Polewali ini.” (*Wawancara*, 13 Juli 2016)

Pendapat ini didukung oleh Ruli, seorang buruh di salah satu Desa Batetangga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar yang berpendapat bahwa:

“Kalau menurut saya, penyebaran informasi tentang pembangunan di Polewali masih belum mencapai desa-desa yang ada di wilayah Polewali. Kadang saya sendiri merasa terlambat mendapatkan informasi terutama tentang apa yang terjadi di Polewali. Informasi yang saya dapatkan biasanya dari mulut ke mulut tentang apa yang terjadi. Saya juga tidak terlalu sering membaca koran atau mendengarkan radio. Jadi

akses informasi yang saya dapatkan berasal dari teman atau keluarga yang biasanya memberitahukan kepada saya apa yang sedang terjadi di Polewali ini.” (*Wawancara*, 13 Juli 2016)

Selain melakukan kerjasama antar instansi, bagian Humas Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar juga menjalin kerjasama kemitraan dengan media massa dan *pers*. Contoh adanya pelayanan kepada wartawan/*pers* baik cetak maupun elektronik dalam rangka peliputan dan publikasi serta melakukan kunjungan jurnalistik untuk mengeksplor wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Selain itu menjalin kerjasama kemitraan dengan Dinas Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Polewali Mandar dalam hal ini mengenai media elektronik, media cetak, dan website maupun dengan radio dan televisi swasta yang ada di daerah maupun yang ada di provinsi.

Dengan demikian, pendekatan kerjasama yang dilakukan tersebut diharapkan menjadi alat bantu Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar dalam proses penyebarluasan informasi pembangunan daerah, agar sama-sama membantu menyampaikan informasi pembangunan daerah baik mengenai kegiatan pembangunan yang akan, sedang atau telah dilaksanakan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pencitraan Humas melalui situs internet pada pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Humas sebagai komunikator terhadap publik yaitu membantu masyarakat membangun interaksi dan komunikasi kepada pemerintah dan sebaliknya, melalui kegiatan sosialisasi.
2. Peran Humas sebagai pembina hubungan (*relationship*) yaitu menciptakan hubungan yang baik antar seluruh masyarakat dengan instansi Pemerintah, melalui penyampaian informasi pembangunan daerah.
3. Peran Humas dalam membangun citra Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar kepada masyarakat dapat dilihat dari informasi *update* melalui situs internet.

## SARAN

Setelah melakukan penelitian mengenai Pencitraan Pemerintah Daerah melalui situs internet pada bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar dalam berikut:

1. Sebaiknya dalam penggunaan media komunikasi Humas dengan situs internet, perlu ada penambahan jangkuan jaringan hingga kedaerah terpencil yang ada di Kabupaten Polewali Mandar.
2. Dalam pemanfaatan *website* Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sebaiknya informasi pada *website* harus lengkap dan jelas serta selalu diperbarui agar masyarakat dapat mengetahui kegiatan terbaru yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro M., Linggar. 2005. *Teori & Profesi Kehumasan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Anwar, M. Khoirul dan Asianti S. 2004. *Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintah di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Effendy, Onong Uchjana. 2002. *Hubungan Masyarakat: Suatu Studi Komunikologis*. Bandung: Rosda Karya.
- Frank. 2004. *Public Relation*. Jakarta: Erlangga.
- Indrajid, Richardus E. 2002. *Elektronic Government*. Yogyakarta. Andi.
- Inpres Nomor 3 Tahun 2003, Tentang Kebijakan dan Strategi E-Government.
- Iriantara, Yosol. 2004. *Community Relations: Konsep dan Aplikasinya*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Kriyantono, Rachmat. 2006, *Teknik Praktik Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media Publik Relations, Advertesing, Komunikasi, Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: Kencana.
- Kusumastuti, Frida. 2002. *Dasar-Dasar Humas*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moleong, LexyJ. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Moore, Frazier. H. 1993. *Hubungan Masyarakat*. Bandung: Rosda Karya.
- Morissan. 2008. *Manajemen Public Relations: Strategi Menjadi Humas Profesional*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Prayudi. 2008. *Manajemen Isu Pendekatan Public Relations*. Yogyakarta: Pustaka Adipura.
- Rachmadi, F. 1993. *Publik Relations dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Ruslan, Rosad. 2005. *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- \_\_\_\_\_. 2011. *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi: Konsepsi dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Santoso, Djoko. 2004. *Ilmu Humas (Public Relations)*. Surakarta: Lab. Ekonomi BKKPAP.
- Suhandang, Kustadi. 2004. *Public Relations Perusahaan*. Bandung: yayasan Nuasa Cenderia.
- Widjaya, A.W. 1986. *Komunikasi: Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.